



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Rabu 15 Mei 2024

RINGKASA BERITA HARI INI



KOORDINASI: Pimpinan DPRD Sidoarjo bersama rombongan DHC 45 melakukan diskusi, Selasa, 14 Mei 2024.

Sinergi Menjaga Warisan Juang untuk Generasi Z

KOTA-Suasana ruang paripurna DPRD Sidoarjo terasa semarak ketika rombongan Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo dipimpin oleh Sujono bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Wakil Ketua DPRD Kayan serta Emir Firdaus. Dialog yang berlangsung santai itu mengupas berbagai hal. Mulai dari sejarah berdirinya DHC 45 Sidoarjo hingga harapan masa depannya.

Pimpin Deklarasi Anti Korupsi, Plt Bupati Tak Ingin Ada Lagi Persoalan Korupsi di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa Para pimpinan OPD dan BUMD di lingkungan Pemkab Sidoarjo secara bersama-sama, berikrar deklarasikan anti korupsi. Deklarasi ini dipimpin langsung Plt Bupati Sidoarjo, Subandi di Pendopo



Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, saat menandatangani teks deklarasi anti korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo, didampingi Sekdakab, dan para pimpinan OPD Sidoarjo.

Subandi Ajak OPD Komitmen Anti Korupsi

KOTA - Plt Bupati Sidoarjo Subandi menghadiri deklarasi komitmen bersama anti korupsi. Hal tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, Subandi mengajak semua stakeholder agar bersama-sama komitmen tak melakukan budaya koruptif. Karena bagaimanapun perilaku tersebut sangatlah tidak baik.

Selektif Pilih Bupati Sidoarjo

PENGACARA kondang asal Sidoarjo, M Sholeh mengingatkan agar pengganti Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, nanti haruslah orang yang bersih dan jujur. Agar tidak kembali membuat sakit hati warga kabupaten Sidoarjo. Karena tiga orang bupati mereka, semuanya telah terjerat kasus korupsi yang memakan uang rakyat.



M Sholeh

Cegah Banjir, Satgas Bersihkan Dam Sungai Mangetan Kanal

SIDOARJO - Dalam upaya mencegah banjir, Satgas Bersihkan Dam Sungai Mangetan Kanal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan saluran air. Kegiatan ini melibatkan seluruh instansi terkait dan masyarakat setempat. Dengan menjaga kebersihan saluran air, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

Pimpinan Dewan Tampung UNEG-UNEG Pengurus DHC 45 Sidoarjo Sekaligus Perjuangkan Hibah

Sidoarjo, Memo X Pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024). Acara yang dihelat di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo itu, dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H Usman M Kes, Wakil Ketua II Kayan SH dan Wakil Ketua III Dr Emir Firdaus ST.



DIALOG - Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes didampingi Wakil Ketua Kayan SH menerima rombongan pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024).

Dalam menyampaikan uneg-uneg itu, Sujono menceritakan proses perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo. Selain itu, juga sekaligus menyampaikan informasi jika Ketua DPRD Sidoarjo secara otomatis merupakan Ketua Dewan Penasehat DHC 45 Sidoarjo. "Selama ini, kegiatan kami masih konsisten mengabdikan dan memberi materi mengenai nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan di sekolah baik tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat. Termasuk kepada masyarakat umum lainnya. Program ini, tentu agar memberikan pengetahuan dan menularkan nilai perjuangan 45 kepada para

KPU Buka Pendaftaran Lomba Maskot dan Jingle Berhadiah Rp 70 Juta

SIDOARJO - Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI, KPU Kabupaten Sidoarjo membuka pendaftaran lomba maskot dan jingle berhadiah Rp 70 juta. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 15 Mei 2024 hingga 31 Mei 2024. Lomba ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, kecuali anggota KPU Sidoarjo dan panitia.

Simulasi Jalur Zonasi untuk Cek Jarak dengan Sekolah

Jalur KKCI di Enam SMPN Dimulai SIDAARJO - Sejak Senin (13/5) hingga hari ini (15/5), pendaftaran SMPN Jalur Zonasi (KKCI) dimulai. Bersamaan dengan pendaftaran tersebut, calon siswa bisa melakukan simulasi pemilihan SMP negeri yang mereka tuju saat pendaftaran jalur zonasi mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Ito Adimengantoro waktu pendaftaran KKCI maupun simulasi pemilihan SMPN beresama Kedumanya berakhir hari ini (15/5). Ito menyatakan, pendaftaran KKCI cukup banyak. "Sangat antusias. Pengantar sudah melampaui kuota, tapi jumlah peserta masih kami tunggu sampai pendaftaran berakhir," jelas Ito.



RAMAI PENDAFTAR: Guru pengantar SDN Sembung 1 Sidoarjo Sunardi (banjir) membantu Citra Artadima Tuisima Nadi melakukan simulasi pendaftaran PPDB SMPN jalur zonasi kemarin.

Kamar Rawat Inap Maksimal Empat Pasien

Layanan BPJS Kesehatan setelah Perpres 59/2021 Terbit Berjalan Iuran dan Manfaat Belum Berubah KEMENTERIAN Kesehatan mengumumkan bahwa aturan baru tentang BPJS Kesehatan yang mengatur maksimal empat pasien per kamar rawat inap akan tetap berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KOORDINASI: Pimpinan DPRD Sidoarjo bersama rombongan DHC 45 melakukan diskusi, Selasa, 14 Mei 2024.

Sinergi Menjaga Warisan Juang untuk Generasi Z

KOTA-Suasana ruang paripurna DPRD Sidoarjo terasa semarak ketika rombongan Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo dipimpin oleh Sujiono bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Wakil Ketua DPRD Kayan serta Emir Firdaus.

Dialog yang berlangsung santai itu mengupas berbagai hal. Mulai dari sejarah berdirinya DHC 45 Sidoarjo hingga

harapan akan masa depannya.

Dalam interaksi yang penuh semangat itu, Sujiono tak hanya mengulas tentang perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo. Tetapi juga memberikan informasi bahwa Ketua DPRD Sidoarjo secara otomatis menjadi ketua dewan penasehat dari DHC 45 Sidoarjo.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan mereka dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan nilai-nilai nasio-

nalisme dan semangat juang kepada generasi muda. Baik di tingkat sekolah maupun masyarakat umum.

"Melalui program ini, kami berharap dapat menanamkan nilai-nilai perjuangan 45 pada generasi Z nantinya. DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 menjadi rumah yang tepat untuk mendiskusikan nilai-nilai perjuangan," ungkap Sujiono..

Di sisi lain, Wakil Ketua DHC 45 Sidoarjo Unggul

Prabowo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Khususnya dalam penambahan nilai hibah yang diterima oleh DHC 45 Sidoarjo selama ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman memberikan apresiasi atas langkah DHC 45 Sidoarjo yang telah menjaga nilai-nilai luhur pejuang 45 hingga generasi saat ini. Menanggapi

permintaan dana hibah yang diajukan, Usman memberikan sinyal hijau untuk dipertimbangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Peran serta DHC 45 Sidoarjo dalam menjaga nilai-nilai perjuangan dan pembangunan harus diapresiasi dengan baik. Insya Allah, kami akan berjuang untuk memperoleh alokasi anggaran yang sesuai bagi DHC 45," tegas Usman. (nis/vga)



Pimpin Deklarasi Anti Korupsi, Plt Bupati Tak Ingin Ada Lagi Persoalan Korupsi di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Para pimpinan OPD dan BUMD di lingkungan Pemkab Sidoarjo secara bersama-sama, berikrar deklarasi anti korupsi. Deklarasi ini dipimpin langsung Plt Bupati Sidoarjo, Subandi di Pendopo

Delta Wibawa bagian belakang, Selasa (14/5)

Subandi membacakan sebanyak 7 point ikrar anti korupsi tersebut, diikuti para pimpinan OPD di Pemkab

▶▶ ke halaman 11



alikusyanto/bhirawa.

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, saat menandatangani teks deklarasi anti korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo, didampingi Sekdakab, dan para pimpinan OPD Sidoarjo.

Selektif Pilih Bupati Sidoarjo

PENGACARA kondang asal Sidoarjo, M Sholeh mengingatkan agar pengganti Bupati

Sidoarjo, Ahmad Muhdlor

Ali atau Gus Muhdlor,

nanti haruslah orang

yang bersih dan ju-

jur. Agar tidak kem-

bali membuat sakit

hati warga kabupaten

Sidoarjo. Karena tiga

orang bupati mer-

eka, semuanya telah

terjerat kasus korupsi

yang memakan uang

rakyat.

“Sebelum memilih

bupati, lihatlah rekam

jejaknya, latar bela-

kangnya, supaya

tidak beli kucing

dalam karung,”

M Sholeh

▶▶ ke halaman 11



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selektif Pilih Bupati Sidoarjo

● Sambungan hal 1

kata M Sholeh, saat ikut turun gunung, di depan Pendopo Delta Wibawa, sehari sebelum Gus Muhdlor ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/5).

Sholeh yang terkenal dengan tagline No Viral No Justice itu mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Warga masyarakat Sidoarjo diingatkan hati-hati, selektif dalam memilih Bupati baru. Jangan hanya sekedar memilih Bupati karena telah diberi uang.

Sebagaimana diketahui, Bupati Sidoarjo-Gus Muhdlor, Selasa 7 April 2024, akhirnya ditahan oleh KPK. Sebelumnya yang bersangkutan dipanggil dua kali oleh KPK, namun tidak hadir. Panggilan pertama, 19 April tidak hadir karena alasan sakit, panggilan kedua tidak hadir lagi tidak ada alasan. Akhirnya pada panggilan ketiga, 7 Mei, yang bersangkutan langsung ditahan KPK.

Dari kasus dugaan korupsi, pemotongan insentif pajak ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo ini, KPK juga telah menahan dua ASN Sidoarjo. Yakni, Siskawati, selaku kasubag umum kepegawaian BPPD dan Ari Suryono, Kepala BPPD Sidoarjo.
[kus.iib]

HARIAN
Bhirawa
Maka Sudah Kita Sediakan

 **PEMKAB**



IST

TEGAS: Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat membacakan deklarasi anti korupsi.

Subandi Ajak OPD Komitmen Anti Korupsi

KOTA - Plt Bupati Sidoarjo Subandi menghadiri deklarasi komitmen bersama anti korupsi. Hal tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, Subandi mengajak semua stakeholder agar bersama-sama komitmen tak melakukan budaya koruptif. Karena bagaimanapun perilaku tersebut sangatlah tidak baik.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Subandi Ajak OPD...

"Mulai dari Sekda, Asisten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Sidoarjo agar punya komitmen," ucapnya, Selasa, 14 Mei 2024.

Subandi tak ingin komitmen tersebut hanya sampai pada lisan. Melainkan pesan itu juga harus sampai pada hati masing-masing.

"Jangan sampai orang melakukan perbuatan itu, harus berhati-hati dan punya rasa takut, Insya Allah

selamat," katanya.

Mantan Wakil Bupati Sidoarjo tersebut mengaku telah mengajak berbicara OPD dan Sekda terkait berbagai permasalahan yang terjadi. Dia meminta agar semuanya mengevaluasi diri.

"Semua OPD sudah punya komitmen mengelola anggarannya masing-masing dan tidak boleh ada intervensi dari luar, intervensi dari keluarga, intervensi dari paman atau siapapun, saya tegaskan tidak boleh, karena

perilaku korupsi tidak terlepas dari kanan kiri kita," terangnya.

"Jadi semua OPD sudah kita wanti-wanti mempunyai keleluasaan untuk mengelola anggaran di OPD masing-masing, tinggal kita sebagai

pimpinan daerah kalau ini tidak bagus ya jangan salahkan kita kalau ada persoalan masalah hukum, yang penting sebagai pimpinan daerah kita sudah wanti-wanti harus berhati-hati," imbuhnya.

Subandi menyebut jika Sidoarjo sudah mendapatkan rambu-rambu dari KPK. Karenanya dia mendorong semua pihak komitmen tak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. (sai/nis)



Pimpinan Dewan Tampung Uneg-Uneg Pengurus DHC 45 Sidoarjo Sekaligus Perjuangkan Hibah

Sidoarjo, Memo X

Pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024). Acara yang dihelat di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo itu, dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H Usman M Kes, Wakil Ketua II Kayan SH dan Wakil Ketua III Dr Emir Firdaus ST.

Sedangkan rombongan pengurus DHC 45 Sidoarjo dipimpin H Sujiono didampingi para pengurus lainnya.

Dalam menyampaikan uneg-uneg itu, Sujiono menceritakan proses perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo. Selain itu, juga sekaligus menyampaikan informasi jika Ketua DPRD Sidoarjo secara otomatis merupakan Ketua Dewan Penasehat DHC 45 Sidoarjo.

"Selama ini, kegiatan kami masih konsisten mengisi dan memberi materi mengenai nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan di sekolah baik tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat. Termasuk kepada masyarakat umum lainnya. Program ini, tentu agar memberikan pengetahuan dan menularkan nilai perjuangan 45 kepada para



DIALOG - Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes didampingi Wakil Ketua Kayan SH menerima rombongan pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024).

generasi Z nanti. Apalagi DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 merupakan rumah yang tepat untuk membahas tentang nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme agar tidak luntur," ujar Ketua DHC 45 Sidoarjo, Sujiono kepada Memo X, Selasa (14/05/2024) usai dialog.

Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DHC 45 Sidoarjo, Unggul Prabowo yang juga hadir dalam acara itu. Dia berharap adanya perhatian lebih kepada Pemkab Sidoarjo melalui bantuan dana hibah.

"Dengan menambah besaran

nilai hibah yang selama ini diterima DHC 45 Sidoarjo, insyaallah kami tetap konsisten membangun nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme untuk para generasi penerus di Sidoarjo," pintanya.

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes mengapresiasi sejumlah langkah dan program DHC 45 Sidoarjo. Apalagi, turut menjaga serta menanamkan nilai-nilai luhur Pejuang 45, kebangsaan dan nasionalisme ke generasi penerus bangsa di Sidoarjo saat ini. (par/wan)

Kamar Rawat Inap Maksimal Empat Pasien

- Layanan BPJS Kesehatan setelah Perpres 59/2024 Terbit
- Besaran Iuran dan Manfaat Belum Berubah

JAKARTA – Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pengganti Perpres 82/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang baru terbit memicu kegunaan. *Baca Kamar... Hal 11*



Kebijakan KRIS masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menkes dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya."

RIZKY ANUGERAH
Kepala Humas BPJS Kesehatan

HARIAN
Bhirawa
Wala Dajud Bhiru Wadud

Kamar Rawat Inap Maksimal Empat Pasien

Sambungan dari hal 1

Persoalannya, tidak ada penjelasan mendetail perihal kelas rawat inap standar (KRIS).

Selama ini, pada kelas perawatan rumah sakit terdapat kelas 1 hingga 3. Itu menentukan jumlah tempat tidur di dalam satu ruangan. Begitu juga iuran peserta BPJS Kesehatan yang dibagi tiga. Yakni, kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 dengan subsidi pemerintah Rp 7.000 menjadi Rp 35.000.

Pada Pasal 46A Perpres 59/2024 dinyatakan bahwa ruang dan fasilitas rawat

inap di rumah sakit memiliki standar. Lalu, pasal itu berhubungan dengan Pasal 103B yang menyebut standar yang dimaksud adalah kelas rawat inap standar (KRIS) yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh rumah sakit pada 30 Juni 2025.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengaku sudah membaca ketentuan baru mengenai layanan rawat inap BPJS Kesehatan yang baru disahkan Presiden Jokowi. "Jadi, yang ada di kepala saya, kelas-kelas itu sudah tidak ada lagi,"

katanya kemarin (14/5).

Melalui peraturan tersebut, pemerintah ingin menyederagamkan atau membuat standar pelayanan di rumah sakit untuk pasien BPJS Kesehatan. Selama ini, dari pengamatannya, kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit berbeda-beda.

Di kelas 3, misalnya, ada RS yang kamarnya diisi sampai enam pasien. Di RS lain, kamar untuk kelas yang sama bisa diisi lebih dari enam pasien. Begitu pun untuk fasilitas seperti kamar mandi, ada yang di luar dan di dalam. Lina mengatakan, upaya

penyeragaman atau standarisasi tersebut bukan berarti tidak ada kelas-kelas rawat inap di RS.

Menurut Lina, aturan terbaru tersebut hanya acuan besarnya. Nanti diatur dengan ketentuan yang lebih teknis. Termasuk juga pengklasifikasian KRIS.

Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, perpres itu bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada. KRIS adalah untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang

rawat inap. "Nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Pak Presiden tanda tangan," ujarnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprpto yang dihubungi terpisah menjelaskan bahwa selama ini ruang rawat inap di setiap rumah sakit bervariasi. Terkadang kelasnya sama, tapi kondisi di ruangan itu berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. "Misal, ada yang punya saluran untuk oksigen, ada yang tidak. Ada yang kamar mandinya di dalam, ada yang di luar," tuturnya kepada *Jawa Pos*. Sehingga, KRIS berfungsi untuk memberikan standar nonmedis kepada rumah sakit.

Pemerintah menetapkan ada 12 standar yang harus dipenuhi rumah sakit. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 46A Perpres 59/2024. Di antaranya, kepadatan

ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Lalu, komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi serta ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.

Selain itu, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk pencahayaan tidur dan kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan *nurse call* pada setiap tempat tidur.

Agus menyatakan belum ada penetapan tarif iuran. Sebab, itu akan dibahas lebih lanjut dan mempertimbangkan banyak hal. Pun, belum ada pembahasan terkait manfaat layanan yang akan diberikan. "Untuk besaran

iuran dan yang lainnya masih menggunakan perpres sebelumnya. Perpres 82/2019, Perpres 64/2020," katanya.

BPJS Kesehatan juga menampilkan adanya penghapusan kelas rawat inap menyusul keluarnya Perpres 59/2024. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugerah menegaskan, aturan anyar itu menyebut mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes). "Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh menteri kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Rizky.

Dari perspektif BPJS Kesehatan, kata dia, KRIS sebetulnya upaya untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. **(fyn/wan/c6/fal)**

HARIAN
Bhirawa
Wala Dajud Bhiru Wadud

KPU Buka Pendaftaran Lomba Maskot dan Jingle Berhadiah Rp 70 Juta

SIDOARJO – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengadakan lomba desain maskot dan jingle. Kegiatan ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, dengan total hadiah sebesar Rp 70 juta.

Mengusung tema "Suara Kita, Masa Depan Sidoarjo", lomba tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sidoarjo yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Muhammad Iskak

menyatakan bahwa tujuan dari lomba ini adalah sebagai strategi sosialisasi untuk mendukung suksesnya Pilkada Sidoarjo 2024.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pesta demokrasi dengan menampilkan karakter khas daerah, sehingga dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat dan mendukung suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo," ujarnya.

Desain maskot dan jingle yang dilombakan dirancang untuk mendukung dan memberikan citra positif terhadap pelaksanaan Pilkada Sidoarjo, baik bagi penyelenggara, peserta pemilu,

maupun masyarakat Sidoarjo. Dengan tema "Suara Kita, Masa Depan Sidoarjo", diharapkan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

"Maskot dan jingle yang dipilih harus mencerminkan sifat ramah, non-partisan, dinamis, menghibur, dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024," jelas Iskak.

Nantinya maskot dan jingle yang terpilih sebagai pemenang akan menjadi milik KPU dan digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati dan wakil bupati tahun ini.

Lomba desain maskot dan jingle dimulai pada 14 Mei 2024, dengan batas akhir pengiriman karya pada 28 Mei 2024. Para peserta diharuskan menyerahkan karya terbaik mereka langsung ke panitia di kantor KPU Sidoarjo, Jl. Cemengkalang No. 1 Sidoarjo. Pemenang lomba akan diumumkan pada 31 Mei 2024.

Lomba ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, kecuali anggota KPU Sidoarjo dan panitia.

"Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran alias

gratis. Hadiah total untuk lomba maskot dan jingle sebesar Rp 70 juta. Pajak hadiah ditanggung pemenang," tegas Iskak.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi website resmi KPU Kabupaten Sidoarjo di kab-sidoarjo.kpu.go.id atau melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya lomba ini, KPU Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menarik perhatian masyarakat lebih luas untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 dan memberikan kontribusi positif dalam pesta demokrasi tersebut. (nis/vga)

Jawa Pos

Simulasi Jalur Zonasi untuk Cek Jarak dengan Sekolah

Jalur KKCI di Enam SMPN Dimulai

SIDOARJO – Sejak Senin (13/5) hingga hari ini (15/5), pendaftaran SMPN jalur kelas khusus cerdas istimewa (KKCI) dimulai. Bersamaan dengan pendaftaran tersebut, calon siswa bisa melakukan simulasi pemilihan SMP negeri yang mereka tuju saat pendaftaran jalur zonasi mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirta Adi mengatakan, waktu pendaftaran KKCI maupun simulasi pemilihan SMPN bersamaan. Keduanya berakhir hari ini (15/5). Tirta menyatakan, pendaftar KKCI cukup banyak. "Sangat antusias. Pendaftar sudah melampaui kuota, tapi jumlah pastinya masih kami tunggu sampai pendaftaran berakhir," jelas Tirta.

Setelah pendaftaran, akan ada seleksi berkas pendaftar. Siswa yang diterima jalur KKCI bakal diumumkan 20 Mei. Tirta mengatakan, KKCI diperuntukkan bagi siswa yang hanya akan belajar selama empat semester atau dua tahun saja. Kuotanya hanya satu kelas masing-masing di enam sekolah. Yakni, di SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 3 Sidoarjo, SMPN 5 Sidoarjo, SMPN 1 Taman, SMPN 1 Krian,



RAMAI PENDAFTAR: Guru komputer SDN Semambung 1 Sidoarjo Sunardi (kanan) membantu Chiara Artandan Tsamira Nada melakukan simulasi pendaftaran PPDB SMPN jalur zonasi kemarin.

dan SMPN 1 Sedati. Mereka juga sekaligus disiapkan untuk bersaing dalam olimpiade sains nasional.

Di tengah proses pendaftaran KKCI, proses simulasi pemilihan SMPN berlangsung lancar. "Mereka simulasi untuk memilih SMPN sehingga saat pendaftaran nanti sudah paham

dan harapannya tanpa kendala. Sejauh ini berjalan lancar," jelas Tirta. Teknis simulasinya, calon siswa login ke website PPDB menggunakan username dan token. Setelah masuk, siswa diminta cek data seperti biodata apakah sudah diisi dan sesuai. Lalu, mereka bisa memilih dua

SMPN yang akan mereka tuju saat pendaftaran jalur zonasi berlangsung pada 19 sampai 21 Juni.

Salah seorang guru SDN Semambung 1 Gedangan Sunardi mengatakan, hasil dari simulasi tersebut, siswa mengetahui jarak rumah mereka dengan sekolah yang dituju. "Muncul jaraknya,"

katanya. Jadi, hasil simulasi tersebut bisa untuk pertimbangan pilihan SMPN yang paling dekat dengan rumah siswa. "Hanya, tidak ada ranking jarak semua siswa yang sudah melakukan simulasi," katanya. Jadi, setiap siswa hanya mengetahui jaraknya masing-masing. (uzi/c6/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PILKADA 2024

Gelar Lomba Desain Maskot dan Jingle

SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar lomba desain maskot dan *jingle* terkait Pilkada 2024. Pendaftaran dimulai kemarin (14/5) hingga 28 Mei mendatang.

Ketua KPU Sidoarjo Mukhammad Iskak mengatakan, lomba tersebut menjadi salah satu upaya menyosialisasikan pilkada Sidoarjo ke masyarakat umum. Karena itu, semakin banyak pendaftar, semakin bagus. Pilkada Sidoarjo akan semakin diketahui masyarakat.

Pihaknya juga tidak membatasi pesertanya. Bisa siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Asalkan bukan anggota KPU maupun panitia. Pihaknya sudah menyiapkan hadiah uang tunai total Rp 70 juta. Untuk masing-masing kategori, baik lomba *jingle* maupun lomba maskot, akan diambil lima pemenang. Mulai juara I sampai harapan II.

"Pendaftaran gratis tanpa biaya. Temanya, *Suara Kita, Masa Depan Sidoarjo*," jelasnya.

Pihaknya ingin, baik *jingle* maupun maskot, bisa menampilkan karakter khas daerah yang

memberikan kesan baik kepada masyarakat. "Mencerminkan ramah, dinamis, menghibur, dan memotivasi masyarakat menggunakan hak pilihnya," jelasnya.

Nanti maskot maupun kampanye tersebut juga menjadi salah satu bahan sosialisasi pilkada. Baik di komunitas, organisasi, maupun lainnya. Pendaftar bisa mengirimkan karya mereka langsung ke Kantor KPU Sidoarjo, Jalan Cemengkalang Nomor 1, Sidoarjo. Pemenangnya diumumkan pada 31 Mei mendatang. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

HAJI

22 CJH Tunda Keberangkatan, Didominasi Pasutri

SIDOARJO - Seminggu menjelang keberangkatan pertama calon jemaah haji (CJH) dari Kota Delta, Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo mengungkapkan ada 22 jemaah yang batal dan menunda keberangkatan hajinya tahun ini.

"Mereka sudah melunasi dan seharusnya berangkat tahun ini, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan penundaan," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Khoidar.

Menurut dia, hampir 50 persen yang batal berangkat haji tahun ini merupakan pasangan

suami istri (pasutri). "Ada yang batal karena suami atau istri ini sakit atau kurang sehat atau hamil sehingga memilih untuk menunda," tuturnya.

Untuk penyebab lainnya, kebanyakan faktor kesehatan yang membuat CJH harus menunda perjalanan haji mereka. Khoidar mengatakan bahwa CJH tersebut akan langsung masuk kuota jemaah yang berangkat pada 2025. Sedangkan posisi mereka diisi jemaah cadangan.

"Sementara ini belum ada, tapi jika ada yang meninggal, bisa dialihkan ke ahli warisnya atau anaknya," katanya. Saat ini total CJH asal Sidoarjo mencapai 2.432 orang yang terbagi dalam 14 kloter pemberangkatan.

Sebanyak 25 CJH asal Sidoarjo dari kloter 43 berangkat pertama pada Selasa (21/5). Sementara itu, pemberangkatan CJH dari Pendopo Delta Wibawa dimulai sekitar awal Juni mendatang.

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Pemandu Ibadah Haji (TPIH), dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIHI) juga sudah diberangkatkan terlebih dahulu.

Khoidar mengatakan, pendamping jemaah haji diberangkatkan Kemenag Sidoarjo pada Kamis (9/5) lalu. (eza/c7/any)

Jawa Pos

Cegah Intervensi Keluarga atau Teman soal Anggaran

Plt Bupati dan Jajaran Deklarasikan Sikap Antikorupsi

SIDOARJO - Sudah tiga kali pemimpin Sidoarjo berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar hal serupa tak terjadi lagi, kemarin (14/5) jajaran petinggi Pemkab Sidoarjo mendeklarasikan dan menandatangani komitmen antikorupsi di Pendopo Delta Wibawa.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi memimpin langsung deklarasi. Ada tujuh poin komitmen antikorupsi yang dibacakan Subandi. Lalu diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten, sekretaris daerah, dan para camat. Deklarasi tersebut disaksikan



BERKOMITMEN: Plt Bupati Sidoarjo Subandi menandatangani komitmen deklarasi antikorupsi bersama Kajari, Kapolres, serta seluruh kepala OPD dan camat di pendopo Kabupaten Sidoarjo kemarin.

jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo.

Isi deklarasi tersebut, antara lain, turut berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak terlibat perbuatan

tercela dan tidak meminta pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Subandi ingin deklarasi bukan sekadar deklarasi. Namun, *mindset* antikorupsi

Karena terjadinya korupsi tidak lepas dari pengaruh kanan-kiri kita. Persoalan yang kemarin terjadi di Sidoarjo jadi koreksi kita.”

SUBANDI
Plt bupati Sidoarjo

juga harus tertanam. Dengan begitu, bergerak di mana pun punya komitmen antikorupsi. “Saya sudah tidak mau OPD dipanggil Kajari, Kapolres, dan lainnya. Karena itu, hindari pungli, gratifikasi, dan lainnya,” katanya.

Dia meminta agar bawasanya bisa profesional. “Kami selalu mewanti-wanti agar hati-hati. Jika tidak

profesional, jangan salahkan kalau ada masalah hukum,” jelasnya. Dia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik. Jangan biarkan ada intervensi dari pihak mana pun. Dia tidak ingin ada teman, kenalan, orang dekat tertentu, atau keluarga dari luar OPD yang ikut cawacawe mengatur anggaran di OPD. Sebab, rambu-rambunya sudah jelas.

“Karena terjadinya korupsi tidak lepas dari pengaruh kanan-kiri kita. Persoalan yang kemarin terjadi di Sidoarjo jadi koreksi kita,” katanya. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan memperbanyak penempelan stiker imbauan *no pungli, no korupsi* di setiap kantor OPD Pemkab Sidoarjo. (**uzi/c19/any**)

Jawa Pos

Plt Bupati Sidoarjo Kompak Bersama Kepala OPD Deklarasi Komitmen Antikorupsi



ANTI KORUPSI - Komitmen bersama untuk menggaungkan antikorupsi dideklarasikan Plt Bupati Sidoarjo, Subandi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/05/2024).

Sidoarjo, Memo X

Komitmen bersama untuk menggaungkan antikorupsi dideklarasikan Plt Bupati Sidoarjo, Subandi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Deklarasi ini digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/05/2024).

Deklarasi ditandatangani Plt Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Sekda Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati dan Inspektur Sidoarjo, Andjar Surjadianto menandatangani komitmen anti korupsi. Terdapat tujuh poin komitmen dalam deklarasi itu. Deklarasi disaksikan langsung Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Inti dari deklarasi itu bersama-sama berperan secara proaktif mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas.

Menurut Subandi deklarasi bersama antikorupsi ini bagian dari upaya mencegah perbuatan korupsi. Karena itu, dirinya mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen bersama memberantas korupsi.

“Seluruh ASN harus proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami berharap dengan deklarasi bersama antikorupsi yang hari ini kita ikuti dapat menjadikan langkah awal Kabupaten Sidoarjo menuju Kabupaten yang bebas korupsi,” ujar Subandi. Mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini juga mewanti-wanti kepada seluruh Kepala OPD untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghindari pungutan liar (Pungli) dan gratifikasi. Jika tidak bisa dipastikan akan berhadapan dengan hukum.

“Saya sebagai Plt Bupati Sidoarjo tidak ingin ada OPD dipanggil Pak Kapolres atau dipanggil Pak Kajari. Karenanya, hindari terkait masalah pungli dan hindari terkait masalah gratifikasi,” pintanya.

Sementara itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. Selain itu, jangan sampai ada intervensi pihak luar. “Karena pengelolaan anggaran seperti itu menjadi salah satu penyebab perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tandasnya. (**par/wan**)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berantas Korupsi, Plt. Bupati Deklarasi Anti Korupsi

SIDOARJO - Upaya berantas dan pencegahan korupsi di Sidoarjo, komitmen bersama antikorupsi dideklarasikan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M.Kn bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD Sidoarjo. Deklarasi ini digelar dipendopo Delta Wibawa, Selasa, (14/5/24).

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati dan Inspektur Sidoarjo Andjar Surjadiano. Ada tujuh poin komitmen dalam deklarasi tersebut. Deklarasi disaksikan langsung oleh Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Inti dari deklarasi tersebut adalah bersama - sama berperan secara proaktif mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas.

Menurut Subandi deklarasi bersama antikorupsi tersebut bagian dari upaya mencegah perbuatan korupsi. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen ber-

sama memberantas korupsi. Seluruh ASN harus proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Harapan dengan deklarasi bersama antikorupsi yang hari ini kita ikuti dapat menjadikan langkah awal Kabupaten Sidoarjo menuju Kabupaten yang bebas korupsi,"ujarnya.

Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh OPD untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghindari Pungli dan gratifikasi. Jika tidak bisa dipastikan akan berhadapan dengan hukum.

"Saya sebagai Plt bupati tidak ingin ada OPD dipanggil oleh pak Kapolres, dipanggil oleh pak Kajari, oleh karenanya hindari terkait masalah Pungli, hindari terkait masalah gratifikasi,"pesannya.

Lebih lanjut ia meminta kepada seluruh OPD untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan sampai terintervensi pihak luar. Pengelolaan anggaran seperti itu menjadi salah satu penyebab perbuatan korupsi. ● Loe



GETR/DITA

Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi deklarasi anti korupsi bersama OPD Sidoarjo Jelaga (14/5/24)

timox

Berantas Korupsi, Plt. Bupati Deklarasi Anti Korupsi

SIDOARJO - Upaya berantas dan pencegahan korupsi di Sidoarjo, komitmen bersama antikorupsi dideklarasikan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M. Kn bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD Sidoarjo. Deklarasi

sama memberantas korupsi. Seluruh ASN harus proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Harapan dengan deklarasi bersama antikorupsi yang hari ini kita ikuti dapat menjadikan langkah awal Kabupaten Sido-

ini digelar di pendopo Delta Wibawa, Selasa, (14/5/24).

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati dan Inspektur Sidoarjo Andjar Surjadiano. Ada tujuh poin komitmen dalam deklarasi tersebut. Deklarasi disaksikan langsung oleh Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Inti dari deklarasi tersebut adalah bersama - sama berperan secara proaktif mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan tugas.

Menurut Subandi deklarasi bersama antikorupsi tersebut bagian dari upaya mencegah perbuatan korupsi. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen ber-

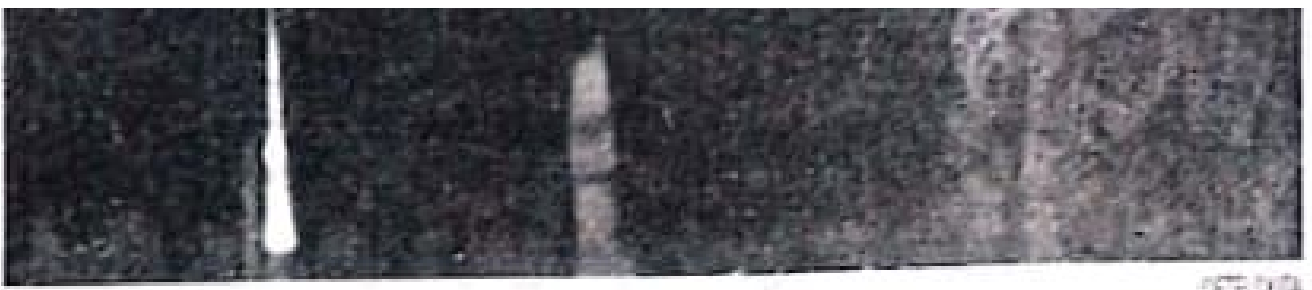
juang menuju Kabupaten yang bebas korupsi,"ujarnya.

Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh OPD untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghindari Pungli dan gratifikasi. Jika tidak bisa dipastikan akan berhadapan dengan hukum.

"Saya sebagai Plt bupati tidak ingin ada OPD dipanggil oleh pak Kapolres, dipanggil oleh pak Kajari, oleh karenanya hindari terkait masalah Pungli, hindari terkait masalah gratifikasi,"pesannya.

Lebih lanjut ia meminta kepada seluruh OPD untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan sampai terintervensi pihak luar. Pengelolaan anggaran seperti itu menjadi salah satu penyebab perbuatan korupsi. • Loe





DETA DUTA

Plt Bupati Sidarjo H.Suhandi deklarasi anti korupsi bersama DPD Sidarjo Jelaga (14/5/24)

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sutinah Bersyukur Ada Posko Kesehatan TMMD

Sidoarjo, Memorandum

Kemanusiaan dan kepedulian TNI tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/ Sidoarjo.

Hal itu sangat dirasakan Sutinah (58), warga Desa Penambangan, Balongben-do yang menderita tekanan darah tinggi sejak lama dengan mendatangi Posko Kesehatan TMMD, Selasa (14/5).

Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan penuh ketelitian oleh tim kesehatan TMMD di bawah pimpinan Pelda Arif Nurcahyo. Sutinah diperiksa secara detail sebelum diberi obat-obatan sesuai dengan kondisinya. Pelda Arif Nurcahyo juga memberikan saran untuk istirahat



Personel kesehatan TMMD memeriksa kesehatan Sutinah.

yang cukup selain memastikan kesehatan Sutinah mendapat perhatian yang serius.

“Ibu Sutinah adalah salah satu dari kita, warga yang sama-sama berjuang untuk kemajuan desa ini. Ketika dia sakit, menjadi kewajiban kita untuk memberikan bantuan dan perhatian,” ungkap Pelda Arif Nurcahyo.

Usai diperiksa, Sutinah menyampaikan terima

kasihnya. “Kami sangat bersyukur memiliki posko kesehatan TMMD. Kami bisa mendapatkan pemeriksaan kapan pun dibutuhkan, 24 jam,” ucapnya. (sbo/jok/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Pasukan Satgas TMMD bersihkan lingkungan sekitar DAM sungai Mangetan Kanal.

10/11/2024

Cegah Banjir, Satgas Bersihkan Dam Sungai Mangetan Kanal

SIDOARJO - Dalam cuaca panas yang membara, Pasukan Satgas Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo tak kenal lelah menjalankan misi kebersihan di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka bahu-membahu membersihkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di sekitar Dam Sungai Mangetan Kanal. Agar tidak ada sampah yang bisa menyumbat hingga menyebabkan banjir jika turun hujan.

Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo telah melancarkan operasi pembersihan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar sungai yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Dengan semangat keber-

samaan, mereka mengambil langkah konkret untuk menghilangkan sampah-sampah yang mengotori sungai dan kanalnya.

Kapten Infanteri Hendro Sugiono, SH, Danramil 0816/10 Balongbendo, menyampaikan, "Kami berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Melalui aksi nyata ini, kami berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk turut serta aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan," ujarnya Selasa (14/5/24).

Aksi pembersihan yang dilakukan oleh Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo juga diikuti oleh partisipasi masyarakat setempat yang peduli akan lingkungan. Mereka bersama-sama membersihkan sampah-sampah yang mengotori sungai dan mengambil peran aktif dalam sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Masih kata Danramil Balongbendo, "kegiatan ini merupakan bagian dari program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo berharap bahwa melalui upaya bersama ini, lingkungan yang bersih dan sehat dapat menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang," ungkapnya.

Terlihat dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan, Satgas TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo terus bergerak maju untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kita semua. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PDAM Delta Tirta Upayakan Solusi Air Keruh yang Menjadi Masalah Musiman

Berita Eksklusif
14 Mei 2024



Usulan ini diterima dan rapat dihadiri oleh PJT1, Dinas Pekerjaan Umum dan BMSDA Sidoarjo, Dinas PU SDA Jatim, BBWS, pengelola IPA Tawang Sari yaitu HTB & TTS, dan pihak terkait lainnya.

Dwi menjelaskan, selama bertahun-tahun, Air keruh telah menjadi masalah musiman di Sidoarjo.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor.

“Seperti pencemaran dan sampah di Kali Pelayaran yang semakin banyak,

Dan penyebab utama air keruh itu adalah surutnya air bahkan tidak adanya aliran air di Kali tersebut,” ujarnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo, eksklusif.co.id – Menanggapi keluhan Warga dan masyarakat Sidoarjo Tentang air keruh musiman setiap tahun, Komisi B DPRD Sidoarjo mengadakan hearing Dengan Perumda Delta Tirta dan berbagai pihak terkait pada tanggal 7 Mei 2024 Hearing ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan air keruh yang meresahkan warga.

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Dwi Hary Soeryadi mengusulkan agar semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dari hulu ke hilir dilibatkan dalam diskusi.



Tidak adanya aliran air dari hulu diakibatkan ditutupnya pintu air untuk berbagai keperluan.

Seperti irigasi sawah, supply air baku, dan pengendalian banjir.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Penutupan pintu air itu menyebabkan penurunan kualitas air baku, Dan peningkatan COD dan BOD yang signifikan, Yang juga menimbulkan bau tidak sedap.

Namun demikian, pihaknya tetap membayar kurang lebih Rp 500 juta setiap bulan kepada PJT1 Untuk pengambilan air kali ini untuk keperluan pengolahan menjadi air bersih bagi masyarakat Sidoarjo di semua intake IPA-nya.

Sementara itu, Dinas PU SDA Provinsi Jatim menjelaskan bahwa mekanisme buka tutup pintu air sudah sesuai dengan SOP dan dilakukan untuk berbagai kepentingan.


Termasuk irigasi, supply air baku, dan pengendalian banjir.



Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah di kali, Terutama limbah industri yang dapat mencemari air.

Diharapkan dengan langkah-langkah itu, kualitas air di Sidoarjo Dapat menjadi lebih baik dan masyarakat dapat menikmati air bersih yang layak konsumsi.

Hearing DPRD Sidoarjo merupakan langkah yang positif untuk menyelesaikan permasalahan air keruh di Sidoarjo.

Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan kualitas air di Sidoarjo dapat segera membaik. 





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk menindak lanjuti hal tersebut telah dilayangkan surat undangan rapat koordinasi teknis Oleh Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada PU SDA Provinsi, PUBM SDA kabupaten Sidoarjo, PJT1, BBWS, PT HTB dan PT TTS.

Dengan harapan, pelayanan kepada masyarakat kedepannya akan meningkat menjadi jauh lebih baik lagi."Ungkapnya. (Ali)



Diskusi dalam hearing tersebut mengungkapkan bahwa semua pihak telah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

Sebagai solusi, hearing menghasilkan beberapa kesepakatan.

Mulai dari evaluasi bersama SOP buka tutup pintu air Kali Pelayaran oleh PU SDA provinsi.

Selain itu, PJT1 diminta untuk lebih mengoptimalkan pembersihan dan pengangkatan sampah secara berkala.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Penuhi Penambahan Hibah DHC 45



by **cakrajatim**

— 14 Mei 2024



0

SHARES



*Cakrajatim. Com- Sidoarjo:-*Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45, melakukan audensi dengan Pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/5/2024).

➔ **CakraJatim.com**



Rombongan DHC 45 Sidoarjo yang dipimpin H.Sujiono ini, diterima langsung H.Usman MKes ketua DPRD Sidoarjo dan M.Kayan SH serta DR Emir Firdaus ST wakil ketua DPRD Sidoarjo di ruang paripurna.

➡CakraJatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

pemerintah daerah, dengan menambah nilai hibah yang selama ini diterima DHC 45 Sidoarjo.

Sementara itu ketua DPRD Sidoarjo H.Usman mengapresiasi langkah DHC 45 Sidoarjo, yang turut menjaga nilai luhur pejuang 45 hingga ke generasi saat ini.

Soal permintaan dana hibah yang diajukan, ketua dewan memberikan sinyal hijau, untuk diperjuangkan pada APBD 2025.

“Peran serta DHC 45 Sidoarjo yang terus menjaga nilai perjuangan dan pembangunan ini, harus diapresiasi dengan baik. InsyAllah akan kita perjuangan nilai anggaran yang baik bagi DHC 45,” tutup Abah Usman. (hds)

➡ **CakraJatim.com**

Apresiasi Kinerja, Pimpinan Dewan Tampung Uneg-Uneg Pengurus DHC 45 Sidoarjo Sekaligus Perjuangkan Hibah

REDAKSI 14 MEI 2024 13:49:33





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam dialog yang berjalan santai dan ganyeng ini, Sujiono membeberkan proses perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo, sekaligus memberikan info jika ketua DPRD Sidoarjo secara otomatis merupakan ketua dewan penasehat dari DHC 45 Sidoarjo.

“Kegiatan kita juga bisa mengisi dan memberi materi mengenai Nasionalisme dan nilai kejuangan di sekolah baik tingkat SD SMP/SMA/ sederajat juga masyarakat pada umumnya. Dengan adanya program ini tentunya agar dapat memberikan pengetahuan dan menularkan nilai juang 45 kepada para generasi Z nantinya. Apalagi DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 adalah rumah yang tepat untuk membahas tentang nilai nilai perjuangan.” Ucap Sujono Ketua DHC 45 wilayah Sidoarjo.

Pada kesempatan ini, wakil ketua DHC 45 Sidoarjo Unggul Prabowo yang juga hadir, mengharapkan adanya perhatian lebih kepada

Dalam menyampaikan uneg-uneg itu, Sujiono menceritakan proses perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo. Selain itu, juga sekaligus menyampaikan informasi jika Ketua DPRD Sidoarjo secara otomatis merupakan Ketua Dewan Penasehat DHC 45 Sidoarjo.

"Selama ini, kegiatan kami masih konsisten mengisi dan memberi materi mengenai nasionalisme dan nilai - nilai perjuangan di sekolah baik tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat. Termasuk kepada masyarakat umum lainnya. Program ini, tentu agar memberikan pengetahuan dan menularkan nilai perjuangan 45 kepada para generasi Z nanti. Apalagi DHC Badan Pembudayaan Perjuangan 45 merupakan rumah yang tepat untuk membahas tentang nilai - nilai perjuangan dan nasionalisme agar tidak luntur," ujar Ketua DHC 45 Sidoarjo, Sujiono kepada republikjatim.com, Selasa (14/05/2024) usai dialog.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIALOG - Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes didampingi Wakil Ketua Kayan SH menerima rombongan pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo menggelar audensi dengan pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/05/2024).

Acara yang dihelat di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo itu, dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H Usman M Kes, Wakil Ketua II Kayan SH dan Wakil Ketua III Dr Emir Firdaus ST. Sedangkan rombongan pengurus DHC 45 Sidoarjo dipimpin H Sujiono didampingi para pengurus lainnya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes mengapresiasi sejumlah langkah dan program DHC 45 Sidoarjo. Apalagi, turut menjaga serta menanamkan nilai-nilai luhur Pejuang 45, kebangsaan dan nasionalisme ke generasi penerus bangsa di Sidoarjo saat ini.

"Soal permintaan dana hibah yang sudah diajukan, kami pimpinan dewan akan berusaha memperjuangkan pada APBD 2025. Kami apresiasi karena peran serta DHC 45 Sidoarjo dalam menjaga nilai-nilai perjuangan dan pembangunan ini, harus diapresiasi dengan baik. Insyallah akan kita perjuangkan nilai anggaran yang tepat bagi DHC 45 Sidoarjo," tandas Abah Usman yang juga salah satu Bakal Calon Bupati (Bacabup) PKB Sidoarjo ini.

Ary/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DHC 45 Sidoarjo, Unggul Prabowo yang juga hadir dalam acara itu. Dia berharap adanya perhatian lebih kepada Pemkab Sidoarjo melalui bantuan dana hibah.

"Dengan menambah besaran nilai hibah yang selama ini diterima DHC 45 Sidoarjo, insyaallah kami tetap konsisten membangun nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme untuk para generasi penerus di Sidoarjo," pintanya.



Zonajatim.com, Sidoarjo – Guna mengenalkan lebih dekat tentang keorganisasiannya, pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sidoarjo melakukan audensi dengan Pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/5/2024).

Rombongan DHC 45 Sidoarjo yang dipimpin ketuanya H Sujiono ini, diterima langsung Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes dan dua wakil ketua DPRD yakni M.Kayan SH serta DR Emir Firdaus ST di ruang paripurna.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Audensi dengan Pengurus DHC 45, Pimpinan DPRD Sidoarjo Beri Sinyal Tambah Dana Hibah



by **ZonaJatim00** — 14 Mei 2024



Zonajatim.com

tentunya agar dapat memberikan pengetahuan dan menularkan nilai juang 45 kepada para generasi Z nantinya, ” katanya.

Apalagi DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 adalah rumah yang tepat untuk membahas tentang nilai nilai perjuangan, tambahanya. Pada kesempatan ini, wakil ketua DHC 45 Sidoarjo Unggul Prabowo yang juga hadir, mengharapkan adanya perhatian lebih kepada pemerintah daerah, dengan menambah nilai hibah yang selama ini diterima DHC 45 Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman mengapresiasi langkah DHC 45 Sidoarjo, yang turut menjaga nilai luhur pejuang 45 hingga ke generasi saat ini.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pimpinan DPRD Sidoarjo saat audensi dengan Pengurus
DHC 45

Ketua DHC 45 Sidoarjo Sujiono menjelaskan proses perjalanan berdirinya DHC 45 Sidoarjo, sekaligus memberikan info jika ketua DPRD secara otomatis merupakan ketua dewan penasehat dari DHC 45 Sidoarjo. "Kegiatan kita juga bisa mengisi dan memberi materi mengenai Nasionalisme dan nilai kejuangan di sekolah baik tingkat SD SMP/SMA/ sederajat juga masyarakat pada umumnya. Dengan adanya program ini



LEGISLATIF

Gelar Dialog Dua Arah, Pimpinan Dewan Apresiasi Peran DHC 45 Sidoarjo Pada Pembangunan Daerah



Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45, melakukan audensi dengan Pimpinan DPRD Sidoarjo, Selasa (14/5/2024).



Rombongan DHC 45 Sidoarjo yang dipimpin H.Sujiono ini, diterima langsung H.Usman MKes ketua DPRD Sidoarjo dan M.Kayan SH serta DR Emir Firdaus ST wakil ketua DPRD Sidoarjo di ruang paripurna.